

**AKTUALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM
PADA KEGIATAN BISNIS DALAM RANGKA MENGHADAPI
TANTANGAN EKONOMI GLOBAL
(STUDI KOMPARATIF SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KAPITALIS)**



SKRIPSI

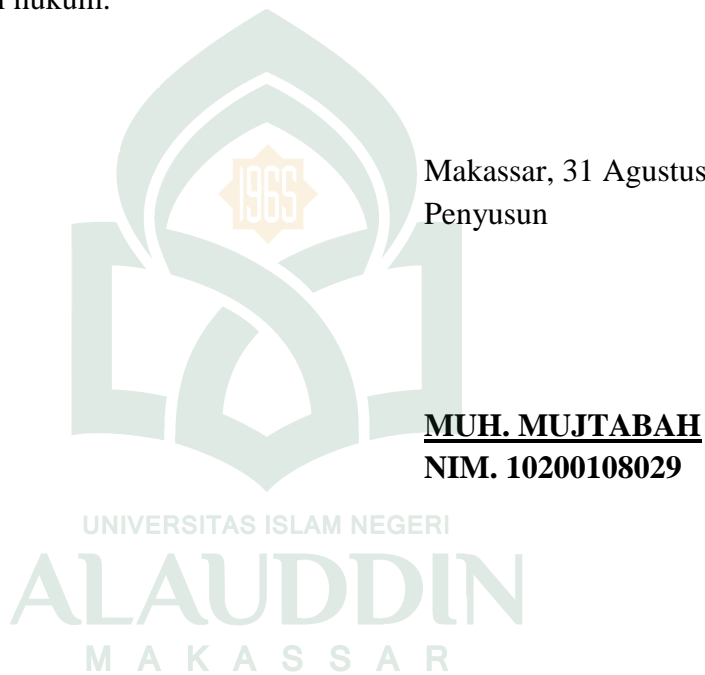
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Jurusan Ekonomi Islam
Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Oleh
MUH. MUJTABA
NIM. 10200108029

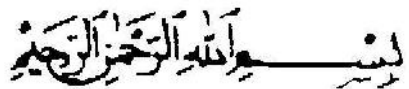
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita ke dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam pada Kegiatan Bisnis dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global”**. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun materiil. Karena itu kemudian, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang tercinta yaitu Ayahanda **Drs. KH. Mujahid Patunrengi** (Almarhum) dan Ibunda **Dra. Hj. Rahmawati** dengan susah dan jerih payahnya

mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti-hentinya baik di waktu kuliah maupun di waktu penyelesaian skripsi ini dan saya berdoa kepada Allah SWT semoga Ayahanda saya tercinta mendapat tempat di sisi-Nya serta segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kepada seluruh kakak-kakak saya Muhajirah dan Mursyidah yang tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materiil serta doa restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Parman, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Kasjim Salenda, SH, M.Thi selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Sohra, M.Ag selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs.Hamzah Hasan, M.HI selaku Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Rahmawati Muin S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi jurusan.
5. Bapak Amiruddin K, S.Ag., M.EI, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Mukhtar Lutfi, M.Pd, selaku Pembimbing II yang telah banyak

memberikan bimbingan, nasihat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.

6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
7. Serta Aryani Arifuddin yang telah sangat banyak membantu saya baik dari segi material maupun moral, yang selalu memberikan support kepada saya dan menemani saya dalam suka maupun duka. *You're someone special for me.*
8. Serta Sahabatku Muthiyah, Widha, Yuyun, Indah, Adi Putra Patata, Zulhajji Mansir, Nuryadin Herdiansya dan EKIS 08 yang selalu memberikan keceriaan dan mewarnai hari-hariku dengan keceriaan mereka.
9. Terima kasih kepada teman-teman Forum Kajian Ekonomi Syari'ah (FORKEIS) yang telah banyak mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada keluarga kecil saya, teman-teman KKN Ang. 47 Desa Kassiloe Kec. Labakkang Kab. Pangkep tanpa terkecuali.
11. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat di sebut satu persatu dalam skripsi ini, mohon di maafkan. Dan kepada kalian di ucapkan banyak terima kasih.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidaksempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Wallahu Muafiq Ila Aqwaith Thariq.

Wassalam

Makassar, 3 Agustus 2012

Penulis

MUH. MUJTABAH



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER SKRIPSI	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Tujuan dan Kegunaan	10
BAB II KONSEP KAPITALISME	11
A. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Kapitalis	11
B. Sisi Positif dan Negatif Ekonomi Kapitalis	17
C. Pengaruh Konsep Ekonomi Kapitalis Terhadap Perekonomian Negara	24
BAB III TINJAUAN EKONOMI ISLAM	27
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam	27
B. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Islam	33
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	37
D. Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer	45
BAB IV EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN	
EKONOMI GLOBAL	49

A. Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Kegiatan Bisnis	49
B. Manajemen Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global	61
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	73



ABSTRAKSI

Nama Penyusun : Muh. Mujtabah
NIM : 10200108029
Judul Skripsi : AKTUALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM PADA
KEGIATAN BISNIS DALAM RANGKA MENGHADAPI
TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Skripsi ini membahas tentang Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam pada Kegiatan Bisnis dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global. Banyak dari kalangan masyarakat yang kurang memahami apa sebenarnya ekonomi Islam itu dan bagaimana penerapan serta strateginya di Indonesia, sehingga penulis membuat skripsi ini untuk menjawab permasalahan yang diutarakan. Sesungguhnya sangat banyak dari negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan. Padahal umat Islam seharusnya tidak susah berpaling jauh jauh ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Untuk memperhatikan masalah di atas maka digunakan beberapa metode yang relevan, yaitu pendekatan Syar'i dan yuridis serta pengumpulan data melalui kajian pustaka. Dengan menggunakan metode tersebut, maka terungkaplah suatu analisa data bahwa betapa kapitalisme tidak mempunyai pilihan selain bersandar sepenuhnya kepada harga dan keuntungan pribadi untuk memberikan mekanisme filter dan daya motivasi untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran agregat dan mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber-sumber daya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya sebuah *addien*, sebuah kepercayaan dan keyakinan yang hanya di jalankan melalui ritual-ritual akan tetapi Islam tidak dapat di pandang sekedar sebuah ritual belaka, melainkan Islam adalah sebuah solusi yang masih harus di gali lebih dalam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang patut dijadikan pedoman hidup bagi setiap umat manusia, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pedoman yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Yang harus diimani, serta dilaksanakan oleh setiap muslim sebagai sandaran dalam melakukan aktivitas keduniaan.

Tatanan kehidupan umat Islam dalam memasuki abad 21 dihadapkan dengan berbagai harapan dan tantangan sehubungan dengan terjadinya perubahan yang mempengaruhi kebijakan suatu negara. Sulitnya menghindari perekonomian global karena peraturan pasar bebas disertai kebijakan yang protektif semakin memperkuat hegemoni kapitalis.

Perubahan peta kekuatan menempatkan umat Islam pada situasi dan posisi yang sangat menentukan. Hal ini bukan saja disebabkan kondisi politik dan ekonomi umat yang masih ditentukan negara industri maju, melainkan suatu pilihan apakah umat Islam memiliki suatu kekuatan baru yang menentukan sistem perekonomian dunia. Ataukah sebaliknya umat Islam selama ini sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan semakin terpuruk sebagai konsumen produk negara maju dengan berbagai dampak kultur, ideologis dan politik.

Pemerataan ekonomi merupakan salah satu masalah besar dalam ekonomi yang dihadapi semua negara yang ada di dunia belakangan ini. Setiap pemerintah negara manapun berusaha agar mampu mengatasi masalah yang dialami oleh negaranya, tetapi tingkat upaya keberhasilan yang dicapai dalam mengatasi pemerataan ekonomi tersebut tergantung pada mekanisme dari sistem ekonomi yang dianut oleh sebuah negara.

Salah satunya cara pengaturan dan pengelolaan perekonomian dalam Islam harus didasari atas prinsip-prinsip Islam. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam yang utama harus diperhatikan adalah etikanya bagi setiap pelaku ekonomi khususnya orang-orang muslim. Di mana kode etik itu harus dipatuhi dalam melakukan kegiatan sosio-ekonomi. Sehingga terpelihara kegiatan ekonomi yang sempurna, disebabkan oleh karena tidak adanya tindak manipulasi dalam perdagangan¹.

Untuk itu Al-Qur'an dengan tegas melarang praktek pembungaan uang atau riba, karena sistem ini dilarang dalam agama Islam. Muncullah koreksi dari umat Islam terhadap penyimpangan yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sebagai contoh, adalah pandangan tentang kepemilikan. Pemilikan dalam sistem kapitalis jelas berbeda dengan sistem sosialis, dan berbeda pula dengan sistem

¹ Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islamic Economic and Society*, diterjemahkan oleh M.Syaiful Anam, dengan judul *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2003), h.2.

Islam². Jika kapitalisme dan sosialisme disoroti lewat kaca mata Islam maka menampakkan bahwa kedua paham tersebut mempunyai landasan yang sama yaitu berpijak pada landasan “materialisme” belaka. Kendatipun dalam operasionalnya kedua paham tersebut mendahulukan kebebasan individu dan menafikan kolektivitas, sedangkan sosialisme mendahulukan kolektivisme dan tidak memperhatikan hak individu. Dan sistem ekonomi Islam sendiri berangkat dari kesadaran tentang nilai dan etika yang mewarnai tingkah laku ekonomi.

Di sinilah ekonomi umat Islam diuji apakah konsep ekonomi di era globalisasi ini mampu bersaing ataukah mempunyai prospek di masa depan. Sementara di bidang ekonomi nilai uang, tingkat bunga, dan nilai tukar valuta asing serta iklim investasi adalah variabel-variabel yang rentan terhadap pengaruh global.

Refleksi ekonomi Islam tidak dapat lagi dianggap sebagai bayangan terhadap perkembangan ekonomi dunia, keberadaannya sebagai salah satu sistem ekonomi dan aktivitas manusia, merupakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai konsep ekonomi di dunia ini, sebab ada hal yang mendasar sekali untuk diketahui oleh manusia, yaitu “Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bernuansa duniawi dan ukhrawi” Seperti yang dijelaskan Allah SWT Q.S. Al Qasash/28: 77:

² Lihat Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqthishadi Fil Islam*, di terjemahkan oleh M.Maghfur Wachid, dengan Judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Cet I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.17.

وَأَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) akhirat, dan janganlah kamu melupakan kewajibanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al Qasash/28: 77)

Perekonomian Islam memiliki akar dalam Syariah yang menjadi sumber perdagangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya . berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-tujuan Islam adalah bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik, memberikan nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi serta menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani serta duniawi maupun ukhrawi dari seluruh umat manusia.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Untuk memperjelas pokok permasalahan yang dibahas, dapat ditarik sebuah permasalahan pokok yang dapat dijadikan landasan dan standarisasi dalam memberikan pemikiran yang sistematis, yaitu:

“Bagaimana Aktualisasi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global?”

Untuk memperoleh uraian dari permasalahan tersebut, maka akan diidentifikasi dalam beberapa sub permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana aktualisasi ekonomi Islam dalam dunia bisnis?
2. Bagaimana strategi pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global?
3. Faktor faktor apa yang mendukung dan menghambat perkembangan ekonomi Islam secara global?

C. Pengertian Judul

Agar mendapat suatu pengertian yang jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran dalam memberikan interpretasi terhadap judul skripsi ini “Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam Pada Kegiatan Bisnis Dalam Rangka Menghadapi Tantangan Ekonomi Global”. Maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian judul tersebut:

1. Aktualisasi berasal dari kata aktual yaitu kejadian yang sesungguhnya atau benar-benar terjadi³.

³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cet 3, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), h. 20.

2. Sistem adalah kumpulan dari beberapa komponen yang membentuk sebuah sistem
3. Ekonomi berasal dari bahasa Belanda yaitu ekonomi yang artinya hemat, sedangkan ekonomi (kata benda) artinya perekonomian⁴.
4. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an, yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT⁵.
5. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dari nilai-nilai Islam⁶.

Dengan demikian, definisi secara operasional dari judul skripsi ini adalah penerapan suatu konsep ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan dasar dan strategi ekonomi Islam, tanpa membatasi ekonomi lain pada perkembangan zaman dan ekonomi dunia era globalisasi.

D. Kajian Pustaka

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah dan memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini.

⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, di terjemahkan oleh Nastangin, dengan Judul Doktrin *Ekonomi Islam*, Jilid 3, (Jakarta; Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 137

⁵ *op.cit.*, h. 340.

⁶ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, dengan Judul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Edisi I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 9.

Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun pokok pembahasan yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini sehingga tidak mengambang jauh.

Adapun buku-buku yang sangat bersentuhan dengan pokok pembahasan antara lain:

- Islam dan Tantangan Ekonomi karangan M. Umer Chapra yang di dalamnya membahas tentang kritik pelaksanaan ekonomi modern (Sosialisme, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan) kemudian mengajukan Islam sebagai alternatif. Tidak hanya membahas aspek teoritis saja, akan tetapi aplikasinya. Sehingga gagasan dapat diterapkan dalam kehidupan.
- Ekonomi Islam (Teori dan Praktek) karangan M. Abdul Mannan membahas tentang nilai-nilai ekonomi Islam dalam konteks pemikiran ekonomi modern. Di samping analisis teoritis tentang berbagai problema ekonomis dari dunia Islam, juga memberikan saran praktis berdasarkan nilai Islam untuk pengambilan Keputusan dalam melakukan kebijaksanaan.
- Menggagas Ilmu Ekonomi Islam karangan Syed Nawab Haider Naqvi di dalam bukunya membandingkan antara ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme, dengan merujuk pada nilai-nilai etik Islam. Selain itu juga mengembangkan suatu framework analitis – sistematis yang berisi nilai-nilai etis Islam yang bisa digunakan sebagai pedoman kebijakan ekonomi.

- Jejak-Jejak Ekonomi Syariah karangan M. Lutfi Hamidi menjelaskan tentang pelaku ekonomi Syariah di tanah air dalam membumikan konsep-konsep ekonomi Syariah dalam dunia nyata, perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia serta kemajuan dan tantangan regulasi perbankan Syariah.
- Doktrin Ekonomi Islam karangan Afzalur Rahman mengkaji seluruh aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, buku ini juga mengupas persoalan-persoalan ekonomi yang muncul dalam dunia modern saat ini.
- Hukum Ekonomi Syariah karangan Zainuddin Ali membahas tentang ekonomi Islam sebagai Ilmu yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam.

Demikian beberapa referensi yang membicarakan tentang aktualisasi ekonomi pada saat ini dan akan datang, tetapi masih banyak lagi referensi yang sangat menunjang dan memiliki bobot kajian yang luas tentang ekonomi Islam. Sepanjang telaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang khusus mengkaji masalah Aktualisasi Sistem Ekonomi Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Syar'i yaitu dengan memperhatikan ketentuan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- b. Pendekatan yuridis yaitu dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan-peraturan yang berlaku guna mengembangkan legalitas persoalan yang dibahas.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka, maka dalam pengumpulan data penulis melakukan riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data melalui kajian referensi atau literatur yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, dengan jalan mengutip secara langsung ataupun tidak langsung.

3. Metode Analisis Data

- a. Deduktif, yaitu metode penganalisaan yang bertitik tolak pada hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu metode penganalisaan yang bertitik tolak pada hal yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan beberapa pendapat yang berbeda kemudian mengambil kesimpulan atau menguatkan salah satu di antaranya.

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana aktualisasi sistem ekonomi Islam dalam dunia bisnis.
- b. Untuk mengetahui strategi pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi global khususnya kapitalisme dan mampu memperbaiki sistem ekonomi Islam yang tidak sesuai dengan konsep syariat Islam yang sebenarnya.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan ekonomi Islam secara global.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan gambaran tentang ekonomi Islam dalam menghadapi ekonomi global khususnya kapitalisme dan Sosialisme.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat Islam dalam mengadakan kegiatan ekonomi haruslah secara benar, sesuai prinsip syariat Islam.

BAB II

KONSEP KAPITALISME

A. Pengertian dan Prinsip Ekonomi Kapitalis

1. Pengertian Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme menurut sejarah berkembangnya sebagai suatu bagian dari gerakan besar individualisme. Gerakan ini menghasilkan reformasi dalam berbagai bidang khususnya dalam ekonomi pada satu sistem yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini mula-mula berkembang di Inggris abad ke-18, kemudian ia dibawa dan dikembangkan di Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran hukum gereja, sehingga tumbuh aliran pemikiran liberalisme di negara-negara Eropa Barat. Aliran ini kemudian merambah ke segala bidang termasuk bidang hukum ekonomi. Saat ini prinsip *laissez faire* diartikan sebagai tiadanya intervensi pemerintah sehingga timbullah individualisme hukum ekonomi dan kebebasan hukum ekonom. Istilah lain dalam sistem hukum ekonomi kapitalis berlaku *free fight liberalism* (sistem persaingan bebas). Siapa yang memiliki dan mampu menggunakan modal (capital) secara efektif dan efisien akan dapat memenangkan pertarungan

dalam bisnis. Paham yang mengagungkan kekuatan modal sebagai syarat memenangkan pertarungan ekonomi disebut sebagai Kapitalisme¹.

Para ilmuwan berkata bahwa kapitalisme merupakan sebuah “revolusi” yang bersifat fundamental dan pembentukan masyarakat modern dewasa ini. Kapitalisme bukan saja dianggap sebagai proses ekonomi, namun juga dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada bagian terakhir abad pertengahan, dan yang kemudian mencerminkan suatu “gaya hidup” (*way of life*) dalam kehidupan sosial masyarakat².

Konsep kapitalisme dapat ditelusuri dari tulisan para ahli sosialis. Karya Sombart adalah konsep kapitalisme yang secara pasti diakui sebagai sebagai dasar bagi sistem pemikiran ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya kapital (modal)³. Sesungguhnya kapitalisme seperti yang kita hadapi dewasa ini mendewakan uang atau kediktatoran Dollar. Demikian G. G Wells berkata:

Kapitalisme adalah suatu yang tak dapat di definisikan, tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem kapitalis. Sesuatu yang kompleks kebiasaan tradisional, energi Perolehan yang tidak terkendalikan, dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup⁴.

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet.1; Jakarta; Sinar Garfika, 2008), h. 16-17.

² Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme*, (Cet. I; Bandung; Remaja Karya, 1986), h. 33.

³ Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, di terjemahkan oleh Nastangin dengan Judul *Teori dan Praktek Ekonomi islam*, (Yogyakarta; Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 311.

⁴ *Ibid.*, h. 312

Menurut Milton H. Spencer menjelaskan bahwa kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak pemilik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik-pabrik, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif⁵.

Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebebasan memiliki harta perorangan.
- b. Persaingan bebas / *free competition*.
- c. Kebebasan penuh.
- d. Mementingkan diri sendiri.
- e. Harga sebagai penentu / *Price system*.
- f. Campur tangan pemerintah minimum.

Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalisme ialah Perolehan menurut uang. Sekalipun Perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses Perolehan membentuk isi gagasan persaingan. Sikap yang secara logis terkadang dalam Perolehan dari luar, karena kebebasan Perolehan kapitalisme pada hakikatnya bersandar pada kesadaran individu akan kekuasaan alaminya. Karena itu kegiatan ekonomi berhubungan erat dengan risiko pribadi, tetapi

⁵ Winardi, *loc.cit.*

si pelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya, asal tidak melanggar hukum.

Teori yang menjadi landasan sistem kapitalis adalah individu yang menjadi pemilik bagi apa yang dihasilkannya, orang lain tidak punya hak. Ia berhak memonopoli semua alat produk yang dapat dicapainya dengan usahanya sendiri, berhak untuk tidak mengeluarkannya, kecuali dengan jalan yang memberi keuntungan padanya. Teori tersebut bertitik tolak pada egoisme, yang hanya cinta pada diri sendiri.

Apabila ditinjau dari sudut ekonomi, bukan dari sudut moral, bahwa salah satu pembawaan dari teori ini adalah rusaknya keseimbangan dalam pembagian kekayaan di antara individu-individu dan tertumpuknya alat-alat produksi di tangan satu kelompok yang merupakan satu kelas yang paling mewah hidupnya dan paling unggul.

Suatu hal yang pasti terjadi dalam sistem kapitalis adalah lahirnya kecenderungan yang keras di kalangan masyarakat untuk mengumpulkan kekayaan dan tidak mengeluarkannya kecuali pada jalan yang mendatangkan keuntungan besar bagi dirinya.

2. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalisme

Sistem Ekonomi kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis

didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemahaman didasari oleh filosofi Adam Smith, bahwa terselenggaranya keseimbangan pasar dikarenakan manusia mementingkan diri sendiri⁶. Kapitalis mengakui bahwa kebebasan manusia tidak bisa bebas lepas tetapi kebebasan manusia terbatas yang dibatasi oleh kebebasan orang lain.

Dengan kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya dalam rangka tidak tersingkir dari pasar. Kadang kala, orang bertindak tidak benar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, tindakan ini tidak mungkin hanya untuk mendapat legitimasi, bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Karenanya kapitalis, bisa saja melakukan hal yang tidak bermoral sebagaimana persepsi kita. Hal tersebut sebagai dampak dari sistem kapitalis yang menjunjung pasar bebas sebagai media untuk mengeksploitasi sumber daya⁷.

Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis antara lain:

a. Kebebasan Memiliki Harta Secara Perseorangan

Setiap negara mengakui hak kebebasan individu untuk memiliki harta perseorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Individu mempunyai kuasa penuh

⁶ Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 17.

⁷ *Ibid.*, h. 80.

terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan⁸.

b. Kebebasan Ekonomi dan Persaingan Bebas

Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak untuk terjun langsung dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan, selagi aktivitas yang dilakukan itu sah dan menurut peraturan negara tersebut.

Berdasarkan prinsip ekonomi dan tuntunannya yaitu persaingan bebas maka, untuk tiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber-sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut⁹.

Kapitalisme memahami persaingan bebas bukan merupakan hasil rancangan manusia walaupun mungkin disebabkan tindakan manusia. Kalaupun ada tujuan akhir yang hendak diketahui, tujuan tersebut tidak lain adalah kelestarian tatanan pasar bebas dan semua mereka yang ada di dalamnya. Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya pemberdayaan di berbagai sektor ekonomi, karena dengan persaingan bebas akan tercipta efisiensi ekonomi.

⁸ Afsalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Diterjemahkan oleh Nastangin, dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 3.

⁹ *Ibid.*

Persaingan bebas yang dikembangkan oleh beberapa negara kapitalisme secara pasti telah membawa kemajuan ekonomi. Tetapi kemajuan itu telah membawa mereka pada kehidupan yang rentang terhadap masalah sosial, dekadensi moral di kalangan remaja, diskriminasi sosial, dll.

c. Ketimpangan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Ketidaksamaan kesempatan mewujudkan jurang perbedaan di antara golongan kaya dan yang miskin semakin miskin¹⁰.

B. Sisi Positif dan Negatif Ekonomi Kapitalis

1. Sisi Positif Sistem Ekonomi Kapitalis

a. Kebebasan

Para pendukung ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat¹¹. Mereka menyebutnya “dasar hukum” ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Ini bukan saja berupaya meningkatkan

¹⁰ Afsalur Rahman, *loc.cit.*

¹¹ Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan, dengan Judul *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: gema Insani Press, 2000), h. 18.

kekayaan negara tetapi dapat mewujudkan distribusi kekayaan yang rasional dalam masyarakat¹².

Kebebasan merupakan faktor yang menjadikan kapitalisme menjadi sistem yang tetap eksis dibanding sosialisme. Kebebasan kapitalis tidak semata-mata didasari atas penghargaan hidup terhadap sesamanya. Prinsip dasar tentang penghargaan kebebasan kapitalis lebih dikarenakan dengan kebebasan manusia akan lebih memberikan nilai tambah dalam produksi.

b. Meningkatkan Produksi

Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap “produksi” dan “tingkat harga” pada tingkat yang wajar. Keadaan ini akan membantu mempertahankan penyesuaian pada tingkat yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang bisa diterima oleh pasar. Untuk itu, rasionalisasi dalam produksi akan mempertahankan semua perkara pada tahap mendasar¹³.

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar merupakan mekanisme yang diperlukan sebagai bentuk berjalannya ekonomi secara fair. Tetapi kadang kala keseimbangan pasar yang ditentukan produsen dan konsumen tidak mampu memenuhi seluruh aspek kehidupan masyarakat maka dalam keadaan ini perlu diintervensi guna menyediakan barang yang diperlukan masyarakat luas.

¹² *op.cit.*

¹³ Umar Chapra, *op.cit.*

c. Profit Motif

Dalam sistem kapitalisme, keuntungan menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha. Semakin sedikit kesempatan untuk memperoleh keuntungan semakin kecil semangat untuk giat bekerja dan meningkatkan produksi. Sebaliknya, jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, setiap orang akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimum pula¹⁴.

Motif mencari keuntungan inilah yang membangun kehidupan kapitalis lebih dinamis.

Mencari keuntungan merupakan faktor pendorong bagi berjalannya mekanisme pasar. Orang yang memiliki fasilitas lebih faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan akan memiliki peran lebih banyak dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Maka orang ingin memiliki fasilitas tersebut dengan tujuan ingin menguasai pasar dunia untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

2. Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis

Belakangan ini para ilmuwan banyak mengkritik sistem ekonomi kapitalisme. Mereka beranggapan bahwa sistem ekonomi kapitalisme telah menimbulkan ketimpangan ekonomi, pengangguran, kekayaan privat, kemiskinan umum. Regenerasi nilai-nilai sosial dan kultural sering menjadi slogan-slogan umum dalam mengkritik ekonomi kapitalisme dewasa ini. Ini berarti bahwa teori dan sistem

¹⁴ Afalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Diterjemahkan oleh Nastangin, dengan Judul *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 3.

ekonomi kapitalis gagal membangun tujuan dari ekonomi itu sendiri yaitu kesejahteraan manusia dalam masyarakat, baik secara ekonomis maupun moral dan kultural. Memang benar bahwa kapitalisme telah memungkinkan kemajuan yang mengagumkan di bidang industri dan teknologi dalam produktivitas di abad ke-19 dan dekade permulaan abad ke-20. Tetapi kapitalisme dikaitkan dalam pikiran banyak orang dengan perang mengerikan, perbedaan pendapat mencolok, kolonialisme, dan banyak ketegangan sosial. Kapitalisme telah menciptakan formasi sosial yang sangat buruk yaitu adanya kelas majikan dan kelas buruh sebagai sumber eksploitasi terhadap kaum proletar (buruh)¹⁵.

Ini disebabkan karena kapitalisme dilihat dari segi teori banyak mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Ketidakmerataan

Persaingan bebas menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bagi orang yang telah berkecukupan dalam suatu bidang tidak banyak peduli dengan orang yang kurang mampu, karena kepedulian bukan bagian dari kewajibannya. Maka ketimpangan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang individualis.

Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian kaya dan miskin, kadang dengan posisi ini mereka gunakan

¹⁵ Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 49.

sebagai legitimasi untuk menuntut lebih banyak kepada negara. Yang kaya merasa berhak diberi fasilitas lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak dipelihara oleh negara, karena ia miskin akibat negara.

b. Timbul Ketidakselarasan

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keadaan ini menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dengan alasan segala apapun yang dikerjakan upaya untuk mengaktualisasikan kebebasan yang dimilikinya. Padahal kebebasan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, di mana manusia yang satu juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan eksploitatif.

Bila prioritas untuk memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme pasar, maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak efisien dan tidak merata¹⁶. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila menggunakan sistem ini.

¹⁶ Lihat Umar Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan, dengan Judul *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: gema Insani Press, 2000), h. 39.

c. Mekanisme Profit

Efisiensi usaha bisa dijadikan legitimasi untuk menaikkan batas produksi dan mengurangi biayanya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan pihak-pihak lain. Kadang kala kuatnya pengaruh orientasi ini menjadikan pengusaha kurang mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja, bagian dalam terselenggaranya produksi. Konsep kerja kapitalis telah menjadikan sebagai syarat terjadinya efisiensi membangun struktur kedudukan diskriminatif.

d. Materialistis

Nilai-nilai sosial seperti kerja sama, saling membantu, dan lain-lain, kurang mendapat tempat dalam kapitalis. Dalam sistem kapitalisme segala kegiatan ekonomi didasarkan atas terpenuhinya optimalisasi guna mencapai *output* produksi dan keuntungan produksi yang diharapkan. Keadaan ini menjadikan hidup bermasyarakat hanya untuk memenuhi aspek-aspek produksi saja, sehingga menimbulkan dorongan bagi manusia untuk selalu berhitung. Hal ini yang menjadikan perilaku transaksional di dalam kehidupan masyarakat.

e. Krisis Moral

Dalam kapitalisme setiap orang mengejar kekayaan supaya mendapatkan peran lebih dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan / penjadwalan

dalam mendapatkan kekayaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini yang mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi) dan terasing oleh dirinya sendiri (aliansi).

Kapitalisme telah menjerumuskan manusia pada sikap yang memperlakukan keadaan (exance), segala sesuatu yang terjadi dianggap sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan masalah nilai bagi masyarakat kapitalis tidak diarahkan pada pemahaman salah satu nilai. Tetapi masyarakat diberi berbagai alternatif pilihan untuk memilih nilai yang dianggapnya paling baik¹⁷.

f. Mengesampingkan Kesejahteraan

Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan daripada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (trickle down effect). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan pengusaha. Bila pengusaha mendapat keuntungan maka secara tidak langsung akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini akan menjadikan kesejahteraan masyarakat terabaikan¹⁸.

¹⁷ Lihat Umar Chapra, *Ibid.*, h. 61-63

¹⁸ Afsalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Diterjemahkan oleh Nastangin, dengan Judul *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 5.

C. Pengaruh Konsep Ekonomi Kapitalis Terhadap Perekonomian Negara

Kapitalis dalam rentang zaman akan mengalami perubahan-perubahan karena ia merupakan ideologi hasil kompromi, termasuk dalam hal ini sistem ekonominya. Maka sistem ekonomi kapitalis mengalami tambal sulam untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, sebagaimana pendapat para pakar ekonominya sendiri yang mengganti ataupun menutupi kelemahan-kelemahan teori-teori ekonomi Kapitalis sebelumnya karena tidak mampu menghadapi realitas yang ada di masyarakat¹⁹.

Di tengah kuatnya kapitalisme global yang menekankan minimalisasi peran negara, ide tentang penting dan aktifnya peran negara sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan sosial akan mendapatkan benturan keras. Negara dalam kapitalisme dituntut tidak terlibat dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial, atau aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial dianggap akan tercipta dengan sendirinya seiring dengan aktivitas ekonomi individu-individu. Dengan kata lain, mekanisme pasarlah yang akan menciptakan kesejahteraan sosial dengan sendirinya.

Perkembangan ini dalam banyak hal merugikan masyarakat sipil sebagai stakeholder terbesar secara kuantitas dalam kehidupan bernegara. Masyarakat sipil

¹⁹ <http://jurnal.ekonomi.org/2003/09/15/cacatnya-kapitalisme-tinjauan-kritis-kegagalan-pasar/>

merupakan stakeholder terlemah menyangkut keterbatasan sumber daya yang mereka miliki ketika berhadapan dengan negara dan swasta atau pelaku bisnis. Negara menguasai sumber daya politik yang kemudian membuatnya memiliki akses yang sangat besar kepada sumber daya ekonomi. Sementara swasta atau pelaku bisnis memiliki sumber daya ekonomi yang membuatnya mampu berkuasa secara politik. Ketimpangan ini sangat berpotensi dan bahkan telah menciptakan kemiskinan struktural²⁰.

Salah satu akibat logis adalah minimnya peran negara dalam penyediaan pelayanan publik, seperti air minum, bahan pangan, lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan. Padahal penyediaan pelayanan publik dasar ini telah menjadi tanggung jawab negara.

Dengan logika sederhana, bila negara menyerahkan upaya penyediaan pelayanan publik dasar kepada mekanisme pasar, maka hanya yang memiliki kemampuan secara finansial sajalah yang akan mampu mendapatkannya. Kaum miskin akan semakin termajinalkan. Tidak ada swasta, melalui mekanisme pasar, yang mau menyediakan pelayanan publik tanpa berpikir apa keuntungan ekonomis yang akan diperolehnya. Pelayanan publik dengan mekanisme pasar seperti ini akan lebih berorientasi pada profit (keuntungan berupa uang) dari pada benefit (kegunaan). Merupakan mekanisme pasar dalam pelayanan publik dasar, sebagaimana yang Dianjurkan jelas semakin membuat negara lepas tangan atas tanggung jawabnya.

²⁰ <http://iqrak.wordpress.com/2007/07/17-21/kriminologi-kesejahteraan.com/>

Pelayanan publik dijadikan salah satu sektor bagi akumulasi pendapatan. Inilah yang kemudian membuat pendidikan dan kesehatan tidak ubahnya seperti komoditas dagang yang hanya dapat dibeli oleh mereka yang memiliki uang.

Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum, khususnya masyarakat miskin, negara seharusnya berperan dalam menyediakan pelayanan publik. Bahkan merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri sesuai dengan hakikat berdirinya. Swasta tetap dapat berperan dalam menyediakan pelayanan publik, namun peran negara tidak dapat di minimalisir begitu saja. Ada dua sebab mengapa konsep negara minimalis memiliki konsekuensi negatif. Pertama, mekanisme pasar akan memarginalisasi kaum miskin atau yang tidak memiliki kemampuan lebih secara finansial. Kedua, secara konseptual negara minimalis dapat dijadikan oleh aktor-aktor politik dalam negara sebagai pembenaran (alasan) melepas tanggung jawab²¹.

Negara sebagai *stakeholder* utama dapat menyatakan bahwa penyediaan pelayanan publik dasar kepada masyarakat bukan lagi menjadi tanggung jawab negara mekanisme pasar dapat menyediakannya. Jika negara turut campur maka stabilitas ekonomi dianggap akan terganggu dengan munculnya pengeluaran bagi masyarakat miskin. Dua konsekuensi ini tentu akan semakin menyengsarakan masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar dalam kehidupan bernegara²².

²¹ *Ibid.*

²² <http://iqrak.wordpress.com/2007/07/17-21/kriminologi-kesejahteraan.com/>

BAB III

TINJAUAN EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan yang menyangkut aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui jalan yang dibenarkan oleh Islam. Maksudnya aktivitas dan kegiatan ekonomi Islam senantiasa berjalan dengan syariat Islam yang tepat dan benar tanpa adanya kesimpangsiuran, kecurangan, dan merugikan orang lain atau pihak yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam membangun Citra manusia sesuai dengan prinsip syariat.

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian Ekonomi Islam secara representatif, maka penulis akan mengutip beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

a. M. Abdul Mannan, berpendapat:

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami nilai-nilai Islam. Beliau menginginkan agar ekonomi Islam mampu mengoptimalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat¹.

¹ Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, di terjemahkan oleh Nastangin dengan Judul *Teori dan Praktek Ekonomi islam*, (Yogyakarta; Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

b. H. Halide, berpendapat:

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Dengan kata lain bahwa ekonomi Islam mengatur perjalanan roda perekonomian yang dilakukan oleh manusia guna memperoleh kebutuhannya yang didasarkan pada prinsip Syariah².

c. Muh. Najetullah Ash-Siddiqy, berpendapat:

Ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal (Ijtihad) dan pengalaman³.

d. Arkham Khan, berpendapat:

Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam)⁴.

e. Kursyid Ahmad, berpendapat:

“Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam⁵”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, tampaknya batasan tentang pengertian ekonomi Islam meskipun secara redaksional berbeda, namun pada

² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 4.

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif; Ekonomi Islam*, (Cet. II: Jakarta; Kencana, 2007), h. 16.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid.*, h. 17.

prinsipnya mengandung pengertian yang sama yakni segala tindakan, perilaku yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, konsumsi, dan distribusi, yang berangkatnya dari Allah SWT. Dan cara-caranya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis, sejahtera, makmur, dan sentosa diridhoi Allah SWT.

Adapun tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain : (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecenderungan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh⁶.

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan tercipta suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 4.

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi, serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha [20]: 6 dan QS. Al-Maidah [5]: 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan kehidupannya (QS. Luqman [31]: 20, An-Nahl [16]: 10-16, fatir [35]: 27-28, az-Zumar [39]: 21).
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan kepada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat dikendalikan, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia.

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, yaitu pemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Ketiga nilai dasar ini merupakan pangkal nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental yang dimaksud ada lima yaitu zakat, pelarangan riba dan judi, kerja sama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan negara⁷.

2. Ruang Lingkup ekonomi Islam

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang fenomena-fenomena ekonomi yang didasari oleh Al-Qur'an dan Hadis. Hal tersebut bukan berarti umat Islam dilarang untuk mempelajari, membahas, atau mengkaji masalah ekonomi kapitalis dan sosialis, akan tetapi umat Islam seharusnya mengkajinya dengan sungguh-sungguh sehingga dapat membandingkan antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan islam itu sendiri. Karena pada dasarnya Islam menganut suatu sistem ekonomi yang handal dan tangguh yaitu suatu sistem ekonomi penyeimbang (moderat) diantara sistem-sistem ekonomi. Disamping itu pula ekonomi Islam mengatur ketentuan-ketentuan perekonomian masyarakat dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islam, sehingga bisa diwujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama⁸.

⁷ *Ibid.*, h. 5-6

⁸ Lihat M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, di terjemahkan oleh Nastangin dengan Judul *Teori dan Praktek Ekonomi islam*, (Lc: Yogyakarta; Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 19.

Dengan adanya batasan masalah diatas, maka ilmu ekonomi islam adalah mengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, dan Islam memiliki makna bahwa terjaminnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat , baik lahir maupun batin kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak.

Berpijak pada tujuan ekonomi yaitu menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kebahagiaan ekonomi, serta memberantas kemiskinan absolut, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semua individu dalam masyarakat. Maka dalam Islam pencapaian yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sehingga aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi tidak lepas dari titik tolak pada nilai-nilai Islam. Islam sendiri sebagai agama yang universal mengakui hak individu dan memiliki kebebasan, namun kebebasan yang dimaksudkan tersebut adalah kebebasan yang masih dalam koridor kewajaran dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia itu sendiri, akan tetapi suatu pelengkap atau merupakan satu wadah atau sarana dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan.

Demikian ruang lingkup ekonomi Islam yang tampaknya menjadi administrasi kekurangan sumber-sumber daya dalam masyarakat, manusia dipandang dari segi konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak hanya mengenai sebab-sebab materiil kesejahteraan, tetapi juga mengenai hak-hak non-

materiil yang tunduk pada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Dalam Islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana dipahami dalam syariat Islam⁹.

B. Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Islam

Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh maslah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Seluruh dasar dan sumber hukum Islam merupakan mu'jizat yang tetap dan kekal. Mu'jizat dalam arti bahwa hukum Islam tidak hanya dibandingkan dengan hukum pasang surut, tetapi juga dengan hukum gaya berat yang sederhana dan eksak. Karena sekalipun hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntutan segar pada setiap masa dan tingkatan, tuntutan juga dibandingkan bagi umat manusia melalui rangkaian wahyu fundamental dan abadi yang telah diberikan Allah kepada Nabi SAW. Pada tingkatan ini perlu mendalami dasar dan sumber hukum Islam yang sebenarnya, untuk menetapkan bahwa itu adalah bimbingan tetap bagi umat manusia setiap zaman. Kita semua mengetahui bahwa pada dasarnya ada 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan Ijtihad yang dapat digunakan oleh umat manusia untuk dapat memenuhi kehidupan dengan sepenuhnya¹⁰.

⁹ *Ibid.*, h. 19-23

¹⁰ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory and Practice*, di terjemahkan oleh Nastangin dengan Judul *Teori dan Praktek Ekonomi islam*, (Yogyakarta; Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 28.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Al-Qur'an*

Sumber hukum Islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah amanah yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia.

Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan-mu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus (10):57)¹¹.

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama di dalamnya dapat ditemui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi hukum-hukum maupun undang-undang ekonomi dalam tinjauan Islam, diantaranya seperti hukum diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang terdapat dalam surah Al-Baqarah [2]:275.¹²

Hadist yang terkait dengan ini yaitu:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang; Jaya Toha Putra, 1996), h. 171

¹² *Ibid.*, h. 36.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سِوَاءٌ

Artinya:

Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda. “mereka itu semuanya sama.” (HR Muslim)¹³

2. *Hadist*

Dalam konteks hukum Islam, sunnah secara harfiah berarti “cara, adat istiadat, dan kebiasaan hidup” yang mengacu pada perilaku Nabi Muhammad saw yang dijadikan teladan. Sunnah sebagian besar didasarkan pada praktek normatif masyarakat di zamannya. Sedangkan hadist merupakan cerita singkat, yang pada pokoknya berisi informasi mengenai apa yang dikatakan, disebut, disetujui, oleh Nabi Muhammad SAW mengenai informasi sahabat-sahabatnya. Jadi hadist hanyalah sesuatu yang bersifat teoritis, sedangkan sunnah adalah pemberitaan sesungguhnya, jika ia menurut kaidah, akan menjadi azas praktek bagi kaum muslimin¹⁴.

Terkait dengan hal ekonomi, berikut penulis akan mengemukakan hadist yang berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan perekonomian yang dianggap representatif sebagai dasar hukum ekonomi Islam, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

¹³ Lihat Shahih Muslim Kitab Al-Buyu' 3254

¹⁴ M. Abdul Mannan, *op. cit.*, h. 32.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِي
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Ma'mar bin Abdullah RA dari Rasulullah SAW beliau bersabda: “Tidak akan monopoli kecuali orang-orang yang jahat”.

3. *Ijma'*

Ijma' sumber ketiga dari hukum Islam, merupakan konsensus, baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara sunnah dan ijma' terletak pada kenyataan bahwa sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi dan diperluas oleh para sahabat, karena mereka merupakan sumber penyampaian, sedangkan ijma' adalah suatu prinsip isi hukum yang baru timbul sebagai akibat dalam melakukan penalaran dan logikanya menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat. Kita menemukan pembenaran terhadap berbagai sumber dinamik, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist¹⁵.

4. *Ijtihad dan Qiyas*

Secara teknik, ijtihad berarti merumuskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikan mungkin benar mungkin juga keliru. Jelaslah asas

¹⁵ Lihat Shahih Muslim Kitab Al-Buyu' 3133

agama Islam seperti ke-Esaan Allah, diutusnya para nabi dan seterusnya tidak tepat merupakan subjek Ijtihad.

Di abad terakhir ini, dalam *ra'y* (pendapat pribadi) merupakan alat pokok ijtihad. Tetapi ketika asas-asas hukum telah ditetapkan secara sistematis, hal itu kemudian digantikan oleh qiyas. Tak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memberikan ketentuan hukum mengenai kehidupan individual dan sosial kaum muslimin. Dengan adanya dinamika berubah sesuai dengan perubahan keadaan. Karena itu perlu ijtihad dan qiyas¹⁶.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam bidang kehidupan ekonomi umat Islam yang tak lepas dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama, kemudian Rasulullah melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada.

Setiap prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam tentunya berasal dari Al-Qur'an. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuk-petunjukNya¹⁷.

¹⁶ *Ibid.*, h. 35.

¹⁷ Lihat Q.S. Al-Ahzab; 72, Q.S. Hud; 61, Q.S. Al-Baqarah; 30.

- b. Isi bumi dan langit diciptakan untuk melayani kepentingan hidup manusia dan ditundukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah¹⁸.
- c. Islam menentukan berbagai macam bentuk kerja yang halal dan haram. Kerja yang halal yang diperbolehkan¹⁹.
- d. Hasil kerja manusia diakui sebagai hasil miliknya.
- e. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.
- f. Harta jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi diratakan dengan jalan kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran seperti zakat, infak, sedekah, dll²⁰.
- g. Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama bukan untuk ditimbun tanpa menghasilkan sesuatu, tetapi dikembangkan dengan jalan yang sah²¹.

Prinsip ekonomi Islam tersebut, akan membentuk dasar sebuah sistem perekonomian secara Islami. Adapun dasar sistem sebuah ekonomi Islam yang dapat diambil dari prinsip-prinsip di atas adalah:

¹⁸ Lihat Q.S. Al-Baqarah; 29, Q.S. Al-Jatsiyah; 13.

¹⁹ Lihat Q.S. An-Nisaa; 29, Q.S. Al-A'raf; 85.

²⁰ Lihat Q.S. Al-Hasyr; 7

²¹ Lihat Q.S. At Taubah; 34

1. Kebebasan Individu

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat sesuatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya²². Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai Tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu kecuali Allah. Nilai tauhid akan membentuk pribadi manusia yang berani dan kepercayaan diri karena segala sesuatu yang dilakukan hanya dipertanggung jawabkan sebagai pribadi di hadapan Allah.

Kebebasan manusia sebagai hamba Allah merupakan modal utama bagi seorang muslim untuk membentuk kehidupan ekonomi yang Islami. Tanpa kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar sebagai seorang khalifah. Dalam surah An-Najm (53) ayat 39, Allah berfirman :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Terjemahnya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”²³.

2. Hak Terhadap Harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan

²² Afsalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam*, di terjemahkan oleh Nastangin dengan Judul *Doktrin Ekonomi islam*, (Cet I; Dana Bakti Wakaf: Yogyakarta, 1995), h. 8.

²³ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 421.

masyarakat umum²⁴. Hak pemilikan harta hanya diperoleh dengan cara sesuai dengan ketentuan Islam. Islam mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta sekedar titipan. Dalam surah An-Nisa (4) ayat 29²⁵.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Salah satu hadist Rasulullah Saw menegaskan

" اَلْمُسْلِمُ عَلَى شَرْوْطِهِمْ اِلَّا حَرَمٌ حَلَالًا اَوْ اَحَلٌّ حَرَمًا "

Artinya:

“Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau manghalalkan yang haram.” (at-Tirmidzi).²⁶

²⁴ Afsalur Rahman (1995), *Op.cit*, h. 8.

²⁵ *Op.cit.*, h. 65.

²⁶ Lihat Sunan At Tirmidzi 1157

3. Ketidaksamaan Ekonomi dalam Batas yang Wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi diantara orang perorang tetapi tidak membiarkannya bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebih-lebihan²⁷.

Ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain untuk saling memberi dan menerima. Akan terjadi keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa butuh, sehingga manusia berusaha menjaga kesamaan dengan sesamanya. Oleh karena itu, sikap individualis dalam sistem ekonomi konvensional tidak berlaku dalam ekonomi Islam.

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial. Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antar sesamanya, satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik, hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna memberdayakan dirinya.

4. Jaminan Sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara Islam, dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.

²⁷ *Op.cit.*

Memang menjadi tugas dan tanggung jawab utama bagi sebuah negara Islam untuk menjamin setiap warga negara, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”²⁸. Firman Allah dalam surah Adz-Dzaariyaat [51]:19²⁹.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dalam sistem ekonomi Islam negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka Islam memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infak, sadaqoh, dan sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera³⁰.

5. Distribusi Kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan pada lapisan masyarakat³¹. Sumber daya alam adalah hak manusia dipergunakan untuk kemaslahatannya, upaya ini tidak akan

²⁸ Afsalur Rahman (1995), *op.cit.*, h. 9.

²⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 416.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

³¹ Lihat Afzalur Rahman (1995), *Loc.cit.*

menjadikan masalah bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkan segala aspek ekonomi yang ada.

6. Larangan Menumpuk Kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam suatu negara³². Seorang muslim berkewajiban untuk mencegah dirinya dan masyarakat supaya tidak berlebihan dalam kepemilikan harta, sehingga menyebabkan ia menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkannya. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Humazah (104) ayat 1-3³³.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpul lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya.

7. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukannya saling bersaing dan

³² *Ibid*

³³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 482.

bertentangan antara mereka³⁴. Dalam Islam hubungan individu dan masyarakat ini berpengaruh besar untuk membangun peradaban manusia di masa depan. Islam menganjurkan untuk bersikap baik dalam membangun masyarakat. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Maidah [5]:2³⁵.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

³⁴ Afsalur Rahman (1995), *op.cit.*, h. 10.

³⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 85.

D. Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer

1. Mazhab Baqir as-sadr

Mazhab ini dipelopori oleh Baqir as-sadr dengan bukunya yang fenomenal yaitu *Iqtishaduna* (ekonomi kita). Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan islam. Ekonomi tetap ekonomi dan islam tetap islam. Keduanya tidak akan pernah dapat dipersatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti islam sedangkan yang lainnya Islam.

Menurut mereka perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Mazhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an " Sungguh telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya (54:49). Oleh karena itu segala sesuatunya telah terukur dengan sempurna, Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Pendapat bahwa keinginan manusia tidak terbatas juga ditolak. Contohnya Manusia akan berhenti minum jika dahaganya telah terpuaskan.

Mazhab Baqir berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Dimana yang

kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya sedangkan yang lemah tidak memiliki akses ke sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Oleh karena itu masalah ekonomi bukan karena sumber daya yang terbatas tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.

Oleh karena itu menurut mazhab ini istilah ekonomi yang islami adalah istilah yang menyesatkan dan kontradiktif. Sebagai gantinya ditawarkan dengan istilah yang berasal dari filosofi islam yaitu Iqtishad, yang secara harfiah berarti keadaan sama seimbang.

Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya maka disusunlah teori-teori ekonomi baru yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah³⁶.

2. Mazhab Mainstream

Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad Saw. Bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah maka dia akan meminta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur.

³⁶ <http://abufitriambardi.blogspot.com/2010/10/3-mazhab-ekonomi-islam-kontemporer.html> 7 Agustus 2012

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas memaksa manusia itu melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas dalam memenuhi keinginannya.

Dalam Ekonomi konvensional pemilihan skala prioritas berdasarkan selera masing-masing pribadi. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama atau boleh juga mengabaikannya. Tetapi dalam ekonomi islami pilihan tidak dapat dilakukan semaunya, harus berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Mazhab ini berpendapat mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-islam tidak diharamkan. Nabi bersabda hikmah atau ilmu itu bagi umat islam adalah ibarat barang yang hilang. Dimana saja ditemukan maka umat islam paling berhak mengambilnya³⁷.

3. Mazhab Alternatif – Kritis

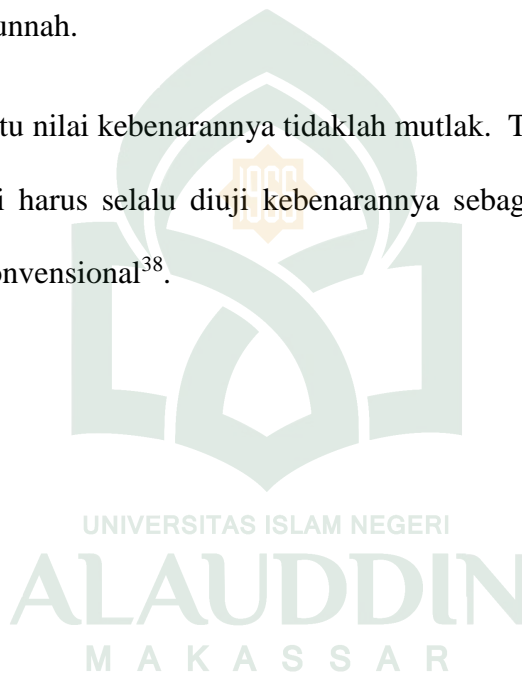
Mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya telah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori yang lama dengan menggantinya dengan teori yang baru. Sedangkan mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan

³⁷ *Ibid.*,

dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat.

Mazhab ini adalah mazhab kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam itu benar tetapi ekonomi islami belum tentu benar karena ekonomi islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Oleh karena itu nilai kebenarannya tidaklah mutlak. Teori-teori yang diajukan oleh ekonomi islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional³⁸.



³⁸ *Ibid.*,

BAB IV

EKONOMI ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

A. Aktualisasi Ekonomi Islam Pada Kegiatan Bisnis

Ada dua sistem sosial yang ekstrem berlawanan antara satu terhadap yang lainnya, baik secara ideal maupun secara praktis. Keduanya mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan sistem sosial yang yaitu:

Sistem ekonomi kapitalis yaitu memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan, tidak ada hak orang lain d dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya.¹

Sistem ini berkembang dari kebebasan individu. Etika ekonomi ini pada dasarnya untuk mencapai kebahagiaan atau kebajikan individu sebesar-besarnya (Hedonisme Egoistik). Sistem ini biasanya dikembangkan bersama sistem politik demokrasi dengan dasar etika *supply* atau *demand* sebagai ajaran penentu percaturan pasar, yang tidak mengenal basa-basi. Apabila *supply* berlebihan maka harga turun, dan untuk mengembalikan harga yang baik maka kelebihan produksi dibinasakan.

¹ <http://www.,com/2008/06/24/Ekonomi-Islam-Islam-dan-Kapitalisme>

Sistem ekonomi sosialis, merupakan suatu sistem ekonomi yang produksinya berdasarkan keperluan, atau dengan kata lain *supply* selalu disesuaikan dengan *demand* produksi sesuai dengan yang diperlukan. Etika dalam sistem ini berdasarkan pada revolusi yang menekankan kelas buruh atas kelas majikan kapitalistik dengan berpijak pada kesetiaan atas doktrin ajaran historis materialisme.

Sedangkan dalam Islam sendiri telah menganut suatu sistem ekonomi, yaitu ekonomi Islam yang dalam kegiatannya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist². Islam sendiri sebagai agama yang universal mengakui hak individu dan memiliki kebebasan, namun kebebasan yang dimaksudkan tersebut adalah kebebasan yang masih dalam koridor kewajaran dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Beberapa kemajuan memang dirasa setelah berkuasanya sistem kapitalisme menguasai dunia, namun ternyata sistem ini pun oleh beberapa kelompok dirasa tidak adil. Kekayaan dirasa hanya berputar dan berkuat dikalangan kelompok tertentu, terutama para pemilik modal, sehingga lahir paham atau ideologi komunisme-sosialisme, yang meyakini bahwa kekayaan mutlak harus dikuasai oleh negara.

Di antara kedua ideologi yang ekstrem ini, Islam memberikan jalan tengah. Sistem ekonomi syari'ah (Islam) memperhatikan kedua sisi yang dianut oleh kedua sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme; kepentingan individu dan masyarakat. Namun, Islam memiliki ciri khas tersendiri dibanding kedua sistem tersebut.

² Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet, I: Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h. 27.

Islam mempunyai keistimewaan sendiri dengan mazhab ekonominya yang istimewa sejak semula. Islam tidak memusatkan pada individu seperti halnya mazhab kapitalis - individualis dan sistem-sistem yang menjadi cabangnya, dan tidak pula memusatkan pada masyarakat sendiri seperti halnya sistem komunis. Akan tetapi sendi dari sistem ekonomi Islam itu ialah penyesuaian, keseimbangan dan perbandingan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Asas dari hal tersebut, bagi Islam ialah kepentingan pribadi dan kepentingan umum, yang satu sama lainnya saling menyempurnakan, dan perlindungan yang satu berarti perlindungan bagi yang lainnya pula. Oleh sebab itu, maka Islam menjamin semua kepentingan pribadi dan umum, mewujudkan keistimewaan perhatian bagi masing-masing dari keduanya, dan menjauhkan kelemahan pengorbanan terhadap salah satunya. Itulah yang diungkapkan dengan ideologi atau sistem pertengahan, berdasarkan firman Allah SWT : *“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan”* (QS. Al-Baqarah [2]: 143) Islam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.³

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem yang sedang berlaku. Ia memiliki akar dalam Syariah yang menjadi sumber pandangannya sekaligus tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan ekonomi Islam adalah bukan sekedar materi. Justru di dasarkan pada konsep mengenai kesejahteraan manusia dan

³ [http: //www.,com/2008/06/24/ Ekonomi-Islam-dan-Kapitalisme](http://www.,com/2008/06/24/ Ekonomi-Islam-dan-Kapitalisme).

kehidupan yang baik, yang memberi nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dan menuntut suatu kekuasaan yang seimbang baik dalam kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia. Hal ini disebabkan oleh keyakinan seruan manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di muka bumi ini, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi.

Jiwa tatanan ekonomi dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hal ini diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil sesuai dengan proporsinya. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan kaum sosialis. Tetapi Islam berada ditengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian Islam menjalankan perannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam berbeda dari sistem-sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam beberapa hal merupakan pertentangan antara kedua paham ekstrem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas dari pada kelemahan yang terdapat pada ke-2 sistem tersebut.

Hubungan antara individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerja sama lebih diutamakan dari pada persaingan dan permusuhan sesama mereka. Untuk tujuan tersebut, ekonomi Islam bukan saja menyediakan individu kemudahan dalam bidang ekonomi dan sosial bahkan juga memberikan mereka pendidikan moral yang membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membantu rekan-rekan sekerja dalam mencapai keinginan mereka atau sekurang-kurangnya tidak menghalangi mereka dalam usahanya untuk hidup.⁴

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang sosialis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkan merusak masyarakat.

Di bawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dari langkah-langkah yang dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Mendalami sistem tersebut ekonomi Islam akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas (*laissez faire*) dan hak pemilikan yang tidak terbatas, atau kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum

⁴ *Ibid*

buruh (proletar) serta tidak berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi tersebar ke seluruh masyarakat. Hal ini seperti di gambarkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr (59):7, yang artinya "...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara golongan kaya saja di kalangan kamu..."⁵

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha) dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dan distribusi kekayaan, semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.

Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem ekonomi kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral dan undang-undang. Secara keseluruhan langkah-langkah yang mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus dikalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja.

Setiap individu mendapatkan bagian yang sewajarnya serta adil sehingga memungkinkan terciptanya kemakmuran masyarakat dan negara. Dengan demikian dalam sistem ekonomi Islam tidak terdapat individu yang menjadi pengelola

⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), h. 436

kekayaan negara ataupun sebaliknya, semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama seperti yang terjadi pada sistem ekonomi sosialis.

Kondisi tersebut diperbaiki agar setiap individu tanpa mengganggu individu lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Individu akan mengeluarkan pendapatnya secara ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat keseluruhan. Dalam sistem tersebut, tidak ada kemungkinan untuk beberapa individu mengambil kesempatan atau mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. Sementara mayoritas rakyat dibiarkan susah payah dalam memenuhi keperluan pokok hidupnya.

Prinsip dalam ekonomi Islam merupakan salah satu percaturan yang sangat patut untuk dicermati. Sehingga pelaksanaan dan pengelolaannya tidak akan terjaring dalam satu posisi utamanya dalam hal hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa adanya kekuatan untuk melihat ke depan, ke belakang, ataupun ke samping, tentang adanya tuntutan bagi masyarakat umum, yakni yang tidak mempunyai kesempatan untuk menikmati ekonomi yang sangat pantas. Dengan demikian prinsip ekonomi Islam sangat menekankan adanya kestabilan, keseimbangan, dan keselarasan.

Sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, Islam memberi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, spiritual, materiil, individual, sosialis, jasmani, rohani, dan duniawi - ukhrawi. Bidang ekonomi juga diperoleh pedoman-pedomannya dalam Islam, pada umumnya dalam bentuk garis besar guna memberi

peluang perkembangan-perkembangan kehidupan ekonomi dikemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya prinsip-prinsip konsepsi Islam dalam mengatur perekonomian.

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil dari hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik, Allah SWT sangat pemurah sehingga disediakan segala kebutuhan manusia yang dapat memberikan kenikmatan, kepuasan, serta kesejahteraan dan kebahagiaan.

Allah SWT sudah menyediakan apa yang ada di bumi dan di langit untuk kebahagiaan umat manusia, tetapi ada batasan-batasannya agar manusia itu juga binasa, kesulitan karena manusia itu sendiri. Adapun salah satu contoh sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Semua orang didorong untuk bekerja bersama-sama dalam menyusun suatu sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan kepada semua orang. Dalam sistem ini, setiap individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak, dengan bekerja untuk dirinya sendiri dan masyarakat keseluruhan.

1. Prinsip keadilan dalam Produksi

Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Umat Islam di seru

supaya merantau di muka bumi untuk mencari sumber kehidupan (setelah selesai beribadat) menurut firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah [62]: 10.⁶

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Juga di temukan dalam beberapa hadis, antara lain berikut ini:

“Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama seperti mujahid di jalan Allah.” (HR. Ahmad)⁷

“Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain.” (HR. Thabrani)⁸

Islam memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memperoleh kehidupan dan memiliki harta kekayaan, tetapi di samping itu ia harus berinisiatif untuk mengambil langkah agar sumber produksi tidak digunakan dengan sewenang-wenang

⁶ Afzalur rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin, dengan Judul *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 77.

⁷ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani press, 2001), h. 10.

⁸ *Ibid*

untuk kesuksesan atau meningkatkan pengaruh orang tertentu dan menindas anggota masyarakat yang lemah.⁹

Umat Islam dilarang meminjamkan harta dengan mengenakan bunga dan sebaliknya justru harus membayar zakat tahunan bagi simpanan yang telah nisabnya.

2. Keadilan dalam konsumsi

Prinsip keadilan menentukan cara penggunaan harta sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran [3]:180.¹⁰

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperolehnya dengan cara yang halal. Tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta yang diperolehnya itu dengan cara yang sewenang-wenang, Islam membatasi

⁹ *op.cit.*, h. 77.

¹⁰ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 108

penggunaannya. Jelasnya terdapat hanya tiga penggunaan yang munasabah terhadap harta yang diperoleh seseorang. Dibelanjakan, atau di investasikan untuk pengembangan hartanya atau disimpan saja.

Suatu masyarakat yang mendapat pengaruh etika Islam selalu berusaha lebih menghormati orang yang memiliki dan menyumbangkan hartanya dari pada golongan yang hanya menumpuk hartanya atau menginvestasikan kekayaannya untuk terus mendapatkan lebih banyak lagi keuntungan.

3. Keadilan dalam distribusi

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: *pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. *Kedua*, berbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.

Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam hal perjuangannya untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kelas (kasta), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan usaha mereka tanpa batasan sosial atau peraturan. Oleh karena itu, tujuan utama Islam ialah memberikan peluang yang sama kepada semua orang dalam perjuangan ekonomi tanpa membedakan status sosialnya. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, Islam mencegah

terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakannya demi kebaikan masyarakat.

Dalam surah Adz-Dzariyaat [51]:19,¹¹

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dijelaskan bahwa orang miskin mempunyai hak terhadap harta orang kaya sehingga sudah semestinya hak tersebut dapat dimiliki. Islam menghendaki agar supaya kelebihan harta seseorang diserahkan kepada masyarakat untuk mencukupi keperluan orang miskin, sehingga kekayaan negara dapat terus beredar di kalangan masyarakat.¹²

Dari pembahasan di atas, dapat kita ambil contoh dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam, misalnya dalam dunia perbankan. Ada sejumlah alasan mengapa institusi keuangan konvensional yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, antara lain pasar yang potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kesadaran mereka untuk berperilaku bisnis secara Islami. Potensi ini menjadi modal bagi perkembangan ekonomi umat di masa datang. Selain itu, terbukti

¹¹ *Ibid.*, h. 859

¹² Lihat Afzalur Rahman, *Ibid.*, h. 79-87

bahwa institusi ekonomi yang menerapkan prinsip syariah, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Menurut Burhanudin Adbullah bahwa di sektor perbankan tahun 2010 nanti jumlah kantor cabang bank-bank syariah diperkirakan akan mencapai 586 cabang. Prospek perbankan syariah di masa depan diperkirakan juga akan semakin cerah. Selain perbankan, sektor ekonomi syariah lainnya yang juga mulai berkembang adalah asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah pada intinya adalah kejelasan dana, tidak mengandung judi dan riba atau bunga. Sama halnya dengan perbankan syariah, melihat potensi umat Islam yang ada di Indonesia, prospek asuransi syariah sangat menjanjikan.

Perbankan dan asuransi, hanya salah satu dari industri keuangan syariah yang kini sedang berkembang pesat. Pada akhirnya, sistem ekonomi syariah akan membawa dampak lahirnya pelaku-pelaku bisnis yang bukan hanya berjiwa wirausaha tapi juga berperilaku Islami, bersikap jujur, menetapkan upah yang adil dan menjaga keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan. Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia.¹³

B. Manajemen Strategi Pengembangan Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Strategi adalah faktor penting dalam pengorganisasian .yang merupakan sebuah proses dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya.

¹³ <http://ibda.wordpress.com/2008/04/11- Prospek-Studi-Ekonomi-Islam>

Ekonomi Islam akan berkembang dengan pesat apabila ada sebuah *grand design* atau *blue print* sebagai acuan bagi semua *stakeholder*. Hal tersebut akan berjalan secara sistematis dan komprehensif apabila ada sinergitas diantara semua pihak sehingga tujuan dari ekonomi Islam yang sebenarnya akan tercapai.

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia, karena ini menyangkut perilaku manusia dalam mengaktualisasikan diri untuk mencapai tujuan hidupnya. Islam merupakan fitrah manusia, karena itu ia bersifat holistik (syumul). Dalam Islam, ekonomi dibahas pada bagian tersendiri, fiqh mu'amalah. Jadi jelaslah sudah bahwa islam memiliki 'aturan main' tersendiri untuk masalah ekonomi.

Ekonomi Islam salah satu jawaban dari permasalahan ekonomi dunia. Sebagai contoh kecil, ketika pasca krisis moneter di Indonesia terjadi, bank syariah malah menjadi jamur yang tidak terbendung. Belum lagi sektor lainnya seperti keuangan publik (Zakat, Infak Shadaqah), sektor riil Syariah (Hotel Syariah, Baju Islami dll) mulai *merayap* menghiasi peradaban bangsa Indonesia. Namun sayang konsep ekonomi Islam yang sebenarnya banyak yang tidak tahu, sehingga kadang menjadi salah kaprah bahkan menjadi bumerang bagi umat islam itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan strategi jitu yang sistematis dan menyeluruh dalam sosialisasi dan pbumian ekonomi islam.

“Manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) Keputusan - Keputusan

strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang”¹⁴.

Dari definisi di atas terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa:

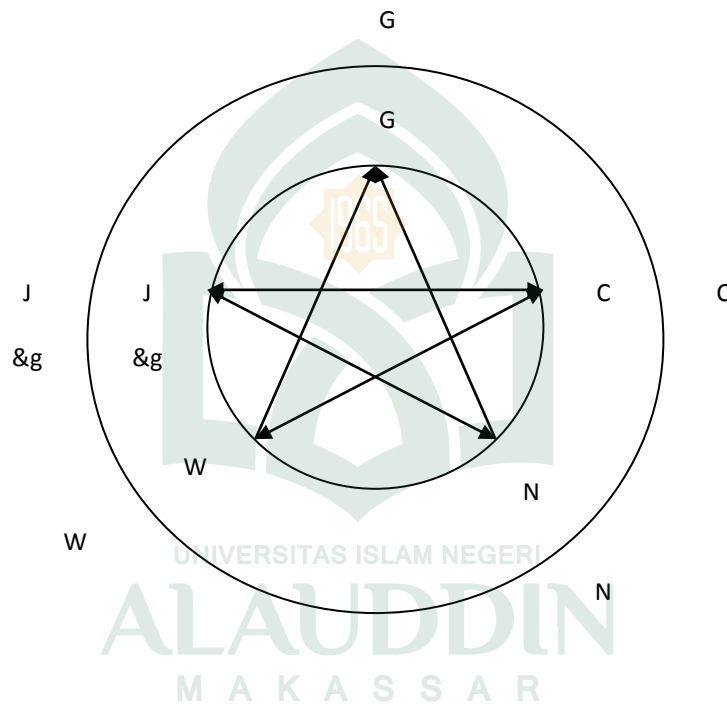
1. Manajemen strategi terdiri dari tiga proses:
 - a. pembuatan strategi (*formulating*)
 - b. penerapan strategi (*implementing*)
 - c. evaluasi/kontrol strategi (*controlling*)
2. Manajemen strategi, memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek sosialisasi, riset dan pengembangan, keuangan dan operasional dari sebuah bisnis/organisasi.

Definisi aktualisasi sendiri, dapat diartikan sebagai suatu tindakan dan proses penanaman, pengakaran dan pengkaffahan yang dapat ditempuh dengan sosialisasi sehingga ekonomi Islam tertanam pada jiwa “masyarakat” dan dapat direalisasikan dalam kehidupan perekonomian sehari-hari.

Secara sederhana Sistem ekonomi Islam merupakan penerapan aktivitas ekonomi yang berdasarkan syariah untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang berkeadilan. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam dalam penerapannya harus berdasarkan nash-nash Al-Quran (bagian-bagian yang tetap), dan ijtihad hasil karya para mujtahid (bagian-bagian yang berubah-ubah) dan *ulil amri*.

¹⁴ Agustinus Sri Wahyudi, *manajemen strategi*, (Jakarta; Bina rupa Aksara, 1996), h. 1.

Persepsi sebagian orang tentang ekonomi Islam yang terlalu ideal mengakibatkan terhambatnya perkembangan ekonomi syariah itu sendiri. Teori Ibnu Kholdun atau yang dinamakan siklus Chapra dapat menjawab pertanyaan mengenai ekonomi Islam yang sebenarnya. Siklus tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini:



keterangan:

S = Syariah

G= Kekuasaan politik

N= Masyarakat

Menurut Dr. M Umar Chapra, Ekonomi Islam adalah : *branch of knowledge* (cabang ilmu) yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya.

Dalam buku *The Future of Economic : An Islamic Perspective*, kita dapat melihat dengan kacamata holistik bahwa untuk mencapai tujuan tercapainya sistem (ekonomi) Islam, bisa dimulai dari mana saja. Ada lima titik yang bisa dipilih sebagai terminal pemberangkatan Sistem (Ekonomi) Islam, yaitu Syariah (S), kekuasaan politik (G), masyarakat (N), kekayaan atau sumber daya atau Maal (W), pembangunan (g) dan keadilan (j).

Kelima variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi. Siklus tersebut dipopulerkan oleh Adiwarman A. Karim dalam pengantar buku *The Future of Economic : An Islamic Perspective* dengan istilah siklus Chapra. Siklus ini merupakan syarah dari kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun yang membahas tentang jatuh bangunnya sebuah peradaban.

Siklus di atas juga dapat diturunkan menjadi fungsi di bawah ini:

$$G = f(S, N, W, g \text{ dan } j)$$

Dimana G merupakan naik turunnya sebuah dinasti, sedangkan S, N, W, g dan j merupakan implementasi syariah, *well-being of the people*, *development and equitable distribution of wealth*, aktualisasi pembangunan atau *growth of*

development, dan justice. Kesemua faktor tersebut saling mempengaruhi, sehingga faktor dependent dapat menjadi independent demikian juga sebaliknya. Sebagai contoh Implementasi syariah sangat tergantung dari kebutuhan masyarakat yang dinamis, misalnya saat ini semakin banyak masyarakat muslim (N) yang ingin bermuamalah secara syariah, tentu konsekuensinya adalah implementasi sistem perekonomian/ perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah akan meningkat. Namun harus disadari juga implementasi syariah tidak dapat berlangsung dengan baik bila ulama terlalu liberal atau terlalu kaku atau pemerintahnya sangat sekular dan korup atau masyarakatnya terlalu miskin, *ignorant* dan tertekan sehingga tidak punya pengaruh yang signifikan. Sehingga dapat dikatakan implementasi syariah tidak akan efektif jika G dan N (termasuk ulama) tidak berperan dengan sempurna dalam mendukung terimplementasinya prinsip-prinsip syariah dengan baik. Maka dalam hal ini jelas terlihat S menjadi *dependent variable*. Dr. Chapra merumuskan untuk mengembangkan ekonomi Islam melalui tahapan S – N - W- j& g – G - S:

1. Tanamkan kesadaran syariah (S),
2. Kembangkan masyarakat sehingga terciptalah Masyarakat (N) yang paham syariah.
3. Meningkatkan kekayaan (W) masyarakat paham syariah ini.
4. Bila ini tercapai maka aspek pembangunan lainnya tidak dapat diabaikan dan yang terpenting adalah pembangunan hukum dan keadilan (j & g). Pada tahap ini kita memiliki masyarakat paham syariah yang kaya dan berkeadilan.

5. Tahap selanjutnya adalah menegakkan pemerintah yang kuat (G).

Namanya siklus, artinya prosesnya dapat memulai dari komponen manapun, asal saja kita sadar konsekuensi logis tahapannya.

C. Faktor - Faktor Pendukung Dan Penghambat Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia.

Menurut M. Syakir Sula, perkembangan misi Ekonomi Islam menghadapi tantangan-tantangan (faktor penghambat) sebagai berikut :

Tantangan Internal :

1. Bagaimana meningkatkan silaturahmi dan kerja sama konkret antar praktisi, LKS dan akademisi.
2. Begitu besar potensi masing-masing yang belum disinergikan
3. Diperlukan ketulusan hati, kebersihan kalbu dan kelurusan niat
4. Empat kebiasaan buruk yang merusak hubungan : su'udzan, ghibah, tajassus (memata-matai), namimah (mengadu-domba).

Khusus tentang Perbankan Syari'ah, Karnaen Perwataatmaja merumuskan tantangan internal atau kelemahan kita adalah :

1. Masih terdapat berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat
3. Masih terbatasnya jaringan pelayanan

4. Moral hazard
5. Tantangan Eksternal
6. Pihak-pihak yang tidak senang dengan berkembangnya ekonomi syari'ah bersatu untuk menghambat perkembangannya : menghambat UU, PP, sosialisasi dan implementasi di masyarakat
7. Ekonomi Islam dikait-kaitkan dengan fanatisme agama
8. Kompetisi teknologi, pelayanan dan perkembangan produk dari sistem keuangan konvensional (sekuler).

Menurut sumber lain, ada beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian umat Islam. Pertama, dampak globalisasi, misalnya pesaing dari LKS asing. Kedua, persaingan di bidang layanan (servis), termasuk di bidang teknologi informasi (TI). Ketiga, dukungan setengah hati dari pemerintah. Keempat, masih terbatasnya SDM yang andal. Kelima, pemahaman masyarakat tentang LKS dan bunga bank haram. Masih ada masyarakat yang masih kurang peduli terhadap hal tersebut.

Tantangan terbesar umat Islam adalah bagaimana mewujudkan umat Islam itu kuat, progresif, dinamis, dan maju. Untuk itu, perlu tiga hal, yakni iman yang kuat, ilmu dan teknologi yang mantap, serta ekonomi yang kokoh,

Semakin lemah umat Islam dari segi ekonomi, maka semakin lemah pula dakwah, pendidikan maupun hal-hal lainnya yang seharusnya merupakan pilar penyokong kekuatan dan wibawa umat. Agama lain melakukan pemurtadan dengan

menyerang dari empat sisi kelemahan umat Islam, yakni lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah di bidang kesehatan, dan lemah di bidang tauhid.

Di sisi lain, umat Islam harus menjadikan berbagai tantangan di bidang ekonomi menjadi peluang. "Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai sekitar 88 persen, idealnya pangsa pasar bank syariah di Indonesia mencapai sekitar 80 persen, dan bank konvensional 20 persen. Minimal, 50 banding 50.

Salah seorang praktisi ekonomi syariah, menyebutkan ekonomi syariah di Indonesia memiliki prospek sangat bagus untuk dikembangkan. Namun, upaya untuk mengembangkan ekonomi syariah masih menemui berbagai kendala dan tantangan. Meskipun demikian, umat Muslim tidak boleh gampang menyerah. "Justru kita harus menjadikan tantangan dan kendala sebagai peluang. Masa-masa menjadikan isu ekonomi syariah sebagai wacana sudah lewat. Yang harus dilakukan sekarang adalah gerak nyata. Juga ditanamkan kemauan keras untuk mewujudkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari,

Bicara mengenai prospek ekonomi syariah di Indonesia, ada empat faktor yang mendukung. Pertama, fatwa bunga bank riba dan haram. Kedua, tren kesadaran masyarakat Muslim, Ketiga, sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, khususnya saat terjadi krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan triliun, Bank Muamalat, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun. Keempat, UU Perbankan

Syariah yang kini terus digodok, dan akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah harus menggunakan asuransi syariah untuk menutup pembiayaan terhadap nasabahnya. Sebaliknya, asuransi syariah harus menyimpan dananya di bank syariah, pasar modal syariah, maupun reksadana syariah.

Prospek ekonomi syariah makin menjanjikan, seiring dengan eksistensi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang makin bergigi. Lembaga pendidikan ekonomi syariah juga makin banyak.

Tantangan sekaligus dapat menjadi peluang bagi yang mampu memanfaatkan dan menggerakkannya. Umat Islam memerlukan orang-orang Muslim yang menguasai Fiqih Muamalat dan ilmu-ilmu umum sekaligus. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki basis *skill* ekonomi syariah yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospektif, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan kita. Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa ketika berbagai pemikiran dan konsep ekonomi syariah ini pertama kali diperkenalkan, kemudian diimplementasikan dalam berbagai institusi ekonomi, sebagian dari kaum muslimin banyak yang ragu dan tidak percaya.

Munculnya sikap semacam ini sebagai refleksi dari pemahaman bahwa ajaran agama Islam hanya mengatur pola hubungan yang bersifat individual antara manusia dengan Tuhannya saja, dan tidak mengatur aspek-aspek lain yang berkaitan dengan mu`amalah yang berhubungan dengan interaksi dan pola kehidupan antar sesama manusia. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat komprehensif dan universal, dimana tidak ada satu bidang pun yang luput dari perhatian Islam, termasuk bidang ekonomi tentunya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di bagian akhir pembahasan ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Meskipun perkembangan ekonomi Islam khususnya BPRS, BMT dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya cukup mengesankan dari segi kuantitas, namun ekonomi umat “belum ada” tanda-tanda terangkat dari bawah oleh perangkat-perangkat kasar ini. Masih diperlukan perjalanan panjang untuk meningkatkan kualitas perekonomian umat. Penyebab keterbelakangan umat terutama di bidang ekonomi ini sebenarnya memiliki banyak faktor. Dengan kata lain fenomena keterbelakangan ini memiliki faktor multidimensional. Karena itu untuk mengatasinya diperlukan pendekatan multidimensional juga. Namun dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang ada seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi keterbelakangan itu. Sinergitas dari semua kalangan masyarakat baik itu regulasi, akademisi maupun praktisi harus terwujud agar tidak ada ketimpangan di dalam membumikan ekonomi Islam di Indonesia. Peran aktif dari masyarakat umum merupakan faktor penting dalam pembumian ekonomi Islam.

2. Sinergitas merupakan salah satu kata kunci dari strategi pengaktualisasian ekonomi Islam disamping kita menyiapkan konsep, sosialisasi, regulasi dan advokasi bagi masyarakat, kemajuan ekonomi Islam akan lebih efektif dan efisien ketika semua bekerja sama dengan koordinasi yang sistematis sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Tahapan-tahapan perkembangan ekonomi Islam akan sistematis ketika ada *master plan* atau *grand design* dalam pencapaian target dan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri . Maka diperlukan sebuah *Blue Print* yang dijadikan semacam panduan atau guidance bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian syariah di Indonesia.
3. Menurut M. Syakir Sula, perkembangan misi Ekonomi Islam menghadapi faktor penghambat internal yaitu: Bagaimana meningkatkan silaturahmi dan kerja sama konkret antar praktisi, LKS dan akademisi mengingat besarnya potensi masing-masing yang belum disinergikan, belum adanya ketulusan hati, kebersihan kalbu dan kelurusan niat untuk mengembangkan ekonomi islam serta empat kebiasaan buruk yang merusak hubungan : su'udzan, ghibah, tajassus (memata-matai), namimah (mengadu-domba).

Khusus tentang Perbankan Syari'ah, Karnaen Perwataatmaja merumuskan faktor penghambat internal atau kelemahan kita adalah karena masih terdapat berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional bank syariah, rendahnya pemahaman masyarakat, masih terbatasnya jaringan pelayanan serta moral *hazard*.

Karnaen Perwataatmaja juga merumuskan beberapa faktor penghambat eksternal yaitu karena banyaknya pihak-pihak yang tidak senang dengan berkembangnya ekonomi syari'ah bersatu untuk menghambat perkembangannya : menghambat UU, PP, sosialisasi dan implementasi di masyarakat, ekonomi Islam dikait-kaitkan dengan fanatisme agama, serta kompetisi teknologi, pelayanan dan perkembangan produk dari sistem keuangan konvensional (sekuler).

Ada empat faktor yang mendukung perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yaitu: fatwa bunga bank adalah riba dan hal tersebut diharamkan, tren kesadaran masyarakat Muslim, Sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, khususnya saat terjadi krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan triliun, Bank Muamalat, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun serta UU Perbankan Syariah yang kini terus digodok, dan akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah di Indonesia.

B. Saran

Sistem ekonomi Islam nampaknya masih menempuh gerakan yang terbatas pada kalangan intelektual (masih merupakan refleksi atau aspirasi kaum elit) belum sepenuhnya mengena di hati masyarakat.

Berangkat dari sini penulis merasa perlu memberikan saran-saran sebagai ungkapan atau gagasan untuk masa depan ekonomi, yaitu:

1. Upaya mensosialisasikan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat atau memasyarakatkan ekonomi Islam. Sehingga sistem ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada sebuah gagasan saja, tapi bagaimana merealisasikan dalam kehidupan masyarakat. Demi menghilangkan kesan dari orang luar bahwa ekonomi Islam hanyalah sebuah retorika belaka.
2. Dalam menghadapi era ekonomi global, maka seharusnya umat Islam hendaknya mengaktualisasikan dan merealisasikan sistem ekonomi Islam dalam kegiatan bisnisnya baik terhadap individu, maupun terhadap kelompok masyarakat.

Karena motif ekonomi Islam adalah penerapan dalam mencari keberuntungan selaku khalifah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Agustinus Sri Wahyudi, *manajemen strategi*, Binarupa Aksara, 1996 Jakarta

Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Amalia, Lia, *Ekonomi Internasional*, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet I ; Karya Abditama, 2010.

Aris Mufti *ekonomi Islam sebagai solusi permasalahan ekonomi di Indonesia*, makalah yang disampaikan pada MUNAS III FoSSEI 2003 Kalimantan Selatan

Aris Mufti, *Repleksi dan Proyeksi Ekonomi Islam*, Munas IV FoSSEI 2004: UNPAD Bandung

Bey Utama Sapta, *Peran Akademisi dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional dan Rakernas FOSSEI Pesantren TAZKIA, 2004 Bogor

Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi (terj)*, Cet. I; Yogyakarta: Narasi, 2006.

Dahlan, dkk. *Kamus Induk Istilah Ilmiah*. Target Press : Surabaya, 2003.

Ebenstein, William, *Isme-Isme (Yang Mengguncang Dunia); Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme*, Cet. II; Yogyakarta: Narasi, 2006.

Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Alauddin Press : Makassar, 2009.

Grossman, Gregory, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara 1995.

Hakim, Cecep Maskanul. *Belajar Mudah Ekonomi Islam Catatan Kritis Terhadap Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Cet, I , Shuhuf Media Insani : Tangerang, 2011.

Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. II; Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2002.

- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mannan, Abdul Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bakti Prima Yasa : Yogyakarta, 1997.
- Naqvi, Syed Nawab Heider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam, *Etika Ekonomi dan Management*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Swasono, Edi-Sri, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*; Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1985.
- Todaro, Michael P, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang (Suatu Pengantar tentang Prinsip, masalah, dan Kebijakan Pembangunan)*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme (Suatu Analisis Ekonomi Teoritis)*, Cet I; Bandung: Remaja Karya, 1986.
- <http://jurnal.ekonomi.org/200kjh3/09/15/cacatnya-kapitalisme-tinjauan-kritis-kegagalan-pasar/>
- <http://www.,com/2008/06/24/Ekonomi-Islam-dan-Kapitalisme.>
- <http://www.republika.co.id/> *Ekonomi Syariah Butuh Gerak Nyata*, , Senin, 14 Mei 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Mujtabah Mujahid, lahir 16 April 1990 di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan ayahanda Drs. K.H. Mujahid Patunrengi (Alm.) dan Ibunda Dra. Hj. Rahmawati.

Masuk Sekolah dasar kelas 1 sampai 4 di SDN Daya I, kelas 5 dan 6 penulis pindah dan menamatkan pendidikannya sekolah di SDN Inpres Batua 2 Makassar pada tahun 2002. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di SLTP Negeri 8 dan selesai tahun 2005. Kemudian melanjutkan kembali pendidikannya di MAKN - MAN 1 Makassar dan selesai tahun 2008.

Pada tahun 2008 penulis di terima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SPMB Lokal pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam, program strata 1 (S1).

Pada tahun 2012 bulan Maret sampai Mei penulis menyelesaikan KKN reguler Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan menjalankan tugasnya sebagai koordinator desa.

Pada tahun 2012, tepatnya tanggal 31 Agustus 2008, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah Universitas Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan predikat “memuaskan” selama 3 tahun 12 bulan 30 hari.